

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Bank

Berberapa pengertian bank menurut Kasmir (2000), adalah sebagai berikut :

- Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.
- Setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.
- Jika ditinjau dari asal mula terjadinya bank maka pengertian bank ialah meja atau tempat untuk menukarkan uang.

Kemudian pengertian bank menurut undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

2.1.2. Jenis-jenis bank

Dalam undang-undang pokok perbankan nomor 14 tahun 1997 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

- Bank Umum
- Bank Pembangunan
- Bank Tabungan
- Bank Pasar
- Bank Desa
- Lumbung Desa
- Bank Pegawai
- Dan Bank jenis lainnya

Kemudian menurut Undang-undang Pokok Perbankan nomor 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-undang RI. nomor 10 tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis Bank, yaitu :

- Bank Umum

Pengertian Bank Umum sesuai dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula

dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah.
Bank umum juga sering disebut dengan bank komersil.

- **Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 adalah “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam arti di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan Bank umum.

Disini dengan keluarnya Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tersebut mengakibatkan perubahan fungsi Bank Pembangunan dan Bank Tabungan menjadi Bank Umum. Kemudian Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

2.1.3. Lingkup Batasan dan Kegiatan-kegiatan BPR

Kegiatan-kegiatan BPR adalah :

- Menghimpun dana, dalam kegiatan penghimpunan dana BPR hanya terbatas pada :
 - a. Tabungan.
 - b. Deposito.
- Menyalurkan dana, kegiatan penyaluran dana BPR dalam bentuk :
 - a. Kredit Investasi.
 - b. Kredit Konsumtif.
 - c. Kredit Modal Kerja.

- Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI
- Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka dan atau tabungan pada bank lain.

Lingkup batasan kegiatan-kegiatan BPR menurut Kasmir (2000), adalah sebagai berikut :

- BPR dilarang untuk menerima simpanan dalam bentuk giro.
- BPR dilarang mengikuti kegiatan kliring.
- BPR dilarang mengikuti transaksi valuta asing.
- Dalam hal modal awal pendirian BPR relatif lebih kecil dibandingkan dengan modal awal Bank umum.

2.1.4. Manajemen Dana Bank

2.1.4.1 Pengertian Sumber Dana Bank

Pengertian sumber dana bank adalah “usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat”. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Kemudian untuk membiayai operasinya, dana dapat pula diperoleh dari modal sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham.

2.1.4.2 Sumber-sumber Dana Bank

Secara garis besar sumber dana bank menurut Kasmir (2000), dapat diperoleh dari :

- Dari Bank itu sendiri

Perolehan dana dari sumber bank itu sendiri maksudnya adalah danan yang diperoleh dari bank. Salah satu jenis dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah modal setor dari para pemegang sahamnya. Jadi secara luas pencairan dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari :

- a. Setoran modal dari pemegang saham yaitu, merupakan modal para pemegang saham lama atau pemegang saham baru.
- b. Cadangan laba, yaitu merupakan laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan.
- c. Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham.

- Dana masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat

menggunakan tiga macam jenis simpanan (rekening). Masing-masing jenis simpanan memiliki keunggulan tersendiri, sehingga bank harus pandai dalam menyiasati pemilihan sumber dana. Sumber dana yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Simpanan Giro.
 - b. Simpanan Tabungan.
 - c. Simpanan Deposito.
- Dana yang bersumber dari lembaga lain

Pencairan dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari :

- a. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sector-sektor usaha tertentu.
- b. Pinjaman antar bank (Call Money), biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring dan tidak mampu membayar kekalahannya. Pinjaman ini bersifat jangka

pendek dengan bunga yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan pinjaman lainnya.

- c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri. Merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri.
- d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Dalam dal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan. SBPU diterbitkan dan ditawarkan dengan tingkat suku bunga sehingga masyarakat tertarik untuk membelinya.

2.1.5. Laporan Keuangan

2.1.5.1 Pengertian Laporan Keuangan

Terdapat beberapa pengertian mengenai laporan keuangan, yaitu :

- Menurut Sofyan (2004), Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu/jangka waktu tertentu.
- Menurut Mudrajat (2002), Laporan Keuangan menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, juga untuk menilai kinerja manajemen perusahaan yang bersangkutan.

2.1.5.2 Tujuan laporan keuangan bank menurut Kasmir (2000) :

1. Memberikan informasi keuangan tentang, jumlah aktiva dan jenis-jenis aktiva yang dimiliki.
2. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-jenis kewajiban baik jangka pendek (lancar) maupun jangka panjang.
3. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-jenis modal bank pada waktu tertentu.
4. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan sumber-sumber pendapatan bank tersebut.
5. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu.
6. Memberikan informasi keuangan tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban dan modal suatu bank.
7. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode dari hasil laporan keuangan yang disajikan.

2.1.5.3 Jenis-jenis laporan keuangan bank

2.1.5.3.1 Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan bank pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi aktiva (harta), pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu bank. Penyusunan komponen di dalam neraca didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh tempo.

Tabel 2.1

NERACA BANK UMUM

NO	AKTIVA		PASSIVA
1	Kas	1	Giro
2	Giro di Bank Indonesia	2	Call money
3	Tagihan pada bank lain:	3	Tabungan
	a. Giro	4	Deposito
	b. Call Money	5	Kewajiban lainnya
	c. Deposito Berjangka	6	Surat berharga
	d. Kredit yang diberikan	7	Pinjaman diterima:
4	Surat berharga		a. Bank Indonesia
5	Kredit yang diberikan		b. Subordinasi, dll
6	Penyertaan	8	Rupa-rupa pasiva
7	Cadangan aktiva yang Diklasifikasikan	9	Modal:
			a. Modal disetor
8	Aktiva tetap dan inventaris		b. Agio saham
9	Rupa-rupa aktiva		c. Cadangan
			d. Laba ditahan
		10	Laba/rugi tahun berjalan
	Jumlah aktiva		Jumlah pasiva

Sumber : Dendawijawa (2003)

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/19/BPPP tanggal 28 Februari 1991, Neraca suatu Bank Umum terdiri atas:

A. Aktiva

Pos-pos yang ada pada sisi aktiva adalah sebagai berikut:

1. Kas

Adalah uang kas, baik rupiah maupun valuta asing, yang dimiliki oleh bank, termasuk kantornya yang ada diluar negeri, yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia maupun uang asing lainnya yang masih berlaku.

2. Giro di Bank Indonesia

Adalah giro dalam rupiah maupun valuta asing milik bank pada bank Indonesia.

3. Tagihan pada bank lain

a. Giro

b. *Call money*

c. Deposito berjangka

d. Kredit yang diberikan

4. Surat berharga dan tagihan lainnya

Surat berharga yang dimiliki oleh bank, termasuk kantornya yang berada di dalam luar negeri, seperti surat-surat berharga pasar uang.

5. Kredit yang diberikan

Semua realisasi kredit dalam rupiah dan valuta asing yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga bukan bank.

6. Penyertaan

Penyertaan dana dalam rupiah maupun valuta asing oleh bank kepada bank, lembaga keuangan dan perusahaan.

7. Cadangan aktiva yang diklasifikasikan

Dibentuk untuk menampung resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat bank tidak dapat menarik kembali sebagian atau seluruh aktiva produktifnya.

8. Aktiva tetap dan inventaris

Nilai buku dari tanah, gedung, kantor, rumah dan perabot milik bank.

9. Rupa-rupa aktiva

Saldo rekening aktiva lainnya yang tidak dapat dimasukkan kedalam salah satu pos diatas.

B. Pasiva

Pos-pos yang ada pada sisi pasiva adalah sebagai berikut:

1. Giro

Giro dalam rupiah dan valuta asing milik pihak ketiga dan bank lain pada bank yang bersangkutan.

2. Call money

Dana dalam rupiah dan valuta asing yang diterima oleh bank

3. Tabungan

Simpanan milik pihak ketiga bukan bank kepada bank yang bersangkutan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu

4. Deposito Berjangka

Yang termasuk dalam pos ini adalah deposito berjangka, *deposits on call*, sertifikat deposito yang diterima oleh bank, milik pihak ketiga dan bank lainnya yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian antara bank yang bersangkutan dengan penyimpan.

5. Kewajiban lainnya

Semua kewajiban bank yang setiap waktu dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar oleh bank yang bersangkutan.

6. Surat berharga

Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang bersangkutan yang menyebabkan kewajiban membayar bagi bank, baik dalam rupiah maupun valuta asing.

7. Pinjaman

Pinjaman yang diterima oleh bank dari pihak ketiga, bank lain, atau bank Indonesia.

8. Rupa-rupa pasiva

Saldo rekening pasiva yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan kedalam salah satu pos neraca ini.

9. Modal

a. Modal disetor

Modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya

b. Agio saham

Selisih lebih setoran modal yang diterima bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

c. Cadangan

d. Laba ditahan

10. Laba/rugi

Sisa laba/rugi tahun-tahun buku lalu yang belum dibagikan. Rugi yang diderita pada tahun lalu dan tahun berjalan tidak boleh dicantumkan pada sisi aktiva namun pada sisi pasiva dengan tanda negatif (-/-).

2.1.5.3.2 Laporan laba rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan bank yang menggambarkan hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan serta jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan.

Tabel 2.2**LAPORAN LABA/RUGI BANK UMUM**

NO	POS-POS	(DALAM JUTAAN)
I	Pendapatan	
	I. Pendapatan Operasional	
	a. Hasil Bunga	xxx
	b. Provisi dan komisi	xxx
	c. Pendapatan Valuta asing lainnya	xxx
	2. Pendapatan Non Operasional	xxx
	Jumlah	xxx
II	Biaya	
	1. Biaya Operasional	
	a. Biaya bunga	xxx
	b. Biaya valuta asing	xxx
	c. Biaya tenaga kerja	xxx
	d. Penyusutan	xxx
	e. Biaya lainnya	xxx
	2. Biaya non operasional	xxx
	Jumlah	xxx
III	Laba/rugi sebelum pajak	xxx
IV	Sisa laba/rugi tahun lalu	xxx

Sumber: UU Perbankan No. 7. 1992

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/19/BPPP tanggal 28 Februari 1991, Bentuk Laporan Laba Rugi adalah Sebagai berikut:

A. Pendapatan

Pendapatan operasional terdiri atas semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-benar telah diterima. Terdiri atas:

1. Hasil bunga

Pendapatan bunga, baik dari pinjaman yang diberikan maupun dari penanaman-penanaman yang dilakukan oleh bank, seperti giro, simpanan berjangka, obligasi, dan surat pengakuan utang lainnya.

2. Provisi dan komisi

Provisi dan komisi yang dipungut atau diterima oleh bank, dari berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti provisi kredit, provisi transfer, komisi pembelian/penjualan efek-efek dan lainnya.

3. Pendapatan valuta asing lainnya

Keuntungan yang diperoleh dari transaksi devisa, misalnya selisih kurs pembelian/penjualan valuta asing.

4. Pendapatan lainnya

Pendapatan lain yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha yang merupakan kegiatan lainnya yang tidak termasuk dalam rekening pendapatan diatas.

B. Biaya

1. Biaya operasional

Yang termasuk dalam pos biaya operasional adalah semua biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha bank, sebagai berikut:

a. Biaya bunga

Semua biaya atas dana-dana yang berasal dari bank Indonesia, bank-bank lain dan pihak ketiga.

b. Biaya valuta asing lainnya

Semua biaya yang dikeluarkan bank untuk berbagai transaksi devisa.

c. Biaya tenaga kerja

Semua biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk membiayai pegawainya, seperti gaji, upah, uang lembur, perawatan kesehatan, honorarium komisaris, dll

d. Penyusutan

Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk penyusutan benda-benda tetap dan inventaris.

e. Biaya lainnya

Biaya lainnya yang merupakan biaya langsung dari kegiatan usaha bank yang belum termasuk dalam

pos biaya tersebut diatas, misal: sewa gedung kantor, biaya pemeliharaan kantor.

2. Biaya non operasional

Semua biaya yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha bank, misal kerugian karena penjualan harta tetap dan inventaris.

C. Laba rugi sebelum pajak

Laba/rugi bank yang diperoleh dalam periode berjalan sebelum dikurangi oleh pajak.

D. Sisa laba rugi tahun lalu

Sisa laba/rugi tahun lalu yang belum dibagikan.

2.1.5.3.3 Laporan komitmen dan kontinjensi

Laporan komitmen merupakan suatu ikatan atau kontrak yang berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Contoh laporan komitmen adalah komitmen kredit, komitmen penjualan atau pembelian aktiva bank dengan kredit, sedangkan laporan kontinjensi merupakan tagihan atau kewajiban bank yang kemungkinan timbulnya tergantung pada terjadi atau tidaknya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Penyajian laporan

komitmen dan kontinjensi disajikan tersendiri atau tanpa pos lama.

2.1.6. Tingkat Kesehatan Bank

2.1.6.1 Pengertian tingkat kesehatan bank

Kinerja bank ini merupakan ukuran keberhasilan bagi direksi bank tersebut, sehingga apabila kinerja ini buruk bukan tidak mungkin para direksi ini akan diganti. Kinerja ini juga merupakan pedoman hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya.

Untuk menilai kesehatan bank dapat diukur dengan berbagai metode. Penilaian kesehatan akan berpengaruh terhadap kemampuan bank adalah dengan analisis CAMEL.

2.1.6.2 Penilaian tingkat kesehatan bank (CAMEL)

Menurut BI (2003), penilaian tingkat kesehatan Bank di Indonesia sampai saat ini secara garis besar didasarkan pada faktor Capital adequacy, Asset quality, Management, Earning dan Liquidity (CAMEL). Kelima faktor tersebut memang merupakan faktor yang menentukan kondisi suatu Bank. Apabila suatu Bank yang mengalami likuiditas (meskipun modal Bank tersebut cukup, selalu untung, dikelola dengan baik dan kualitas aktiva produktifnya baik), maka apabila permasalahan tersebut

tidak segera diatasi, dapat dipastikan Bank tersebut akan menjadi tidak sehat.

Meskipun secara umum faktor CAMEL relevan digunakan untuk semua Bank, tetapi bobot masing-masing faktor akan berbeda untuk masing-masing jenis Bank. Berikut penilaian kesehatan berdasarkan CAMEL antara Bank Umum dan BPR.

Tabel 2.3
PENILAIAN KESEHATAN BANK BERDASARKAN
CAMEL

No	Faktor CAMEL	Bank Umum	BPR
1	Permodalan	25%	30%
2	Kwalitas Aktiva Produktif	30%	30%
3	Manajemen	25%	20%
4	Rentabilitas	10%	10%
5	Likuiditas	10%	10%

Sumber : UU Perbankan No. 10. 1996

Tabel 2.4
BOBOT PENILAIAN BPR

NO	FAKTOR CAMEL		BOBOT
1	Permodalan		30%
2	Kualitas Aktiva Produktif a. KAP b. PPAP	25% 5%	30%
3	Manajemen a. Manajemen Umum b. Manajemen Resiko	8% 12%	20%
4	Rentabilitas a. ROA b. BOPO	5% 5%	10%
5	Likuiditas a. Rasio alat likuid b. LDR	5% 5%	10%

Sumber : UU Perbankan No. 10, 1996

Tabel 2.5**PERINGKAT TINGKAT KESEHATAN BANK**

Nilai Kredit	Predikat
81 - 100	Sehat
66 - 80	Cukup Sehat
51 - 65	Kurang Sehat
0 - 50	Tidak Sehat

Sumber : UU Perbankan No. 10, 1996

2.1.6.3 Unsur-unsur penilaian dalam CAMEL

2.1.6.3.1 Capital (Permodalan)

Penilaian didasarkan kepada permodalan yang dimiliki oleh salah satu bank. Salah satu penilaian adalah dengan metode CAR (Capital Adequacy Ratio) yaitu dengan cara membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).

Tabel 2.6

PERHITUNGAN AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RESIKO (ATMR)

NO	KETERANGAN	NOMINAL	BOBOT RESIKO (%)
1	ATMR Aktiva Neraca		
1.1	Kas	xxx	0%
1.2	Emas dan mata uang emas	xxx	0%
1.3	Giro pada BI	xxx	0%
1.4	Tagihan pada bank lain	xxx	20%
1.5	Surat Berharga		
	a. SBI	xxx	0%
	b. SBPU yang diterbitkan bank sentral	xxx	0%
	SBPU yang diterbitkan pemerintah pusat	xxx	0%
	SBPU bank lain, pemerintah daerah	xxx	0%
	SBPU pihak swasta lainnya	xxx	20%
	c. Saham dan obligasi		
	Diterbitkan bank lain/perusahaan Negara	xxx	20%
	Diterbitkan perusahaan lainnya	xxx	20%
1.6	Kredit yang diberikan kepada dijamin oleh		
	a. Bank Sentral	xxx	0%
	b. Pemerintah Pusat	xxx	0%
	c. Bank lain/pemerintah daerah	xxx	20%
	d. Kredit pemilikan rumah	xxx	50%
	e. Pihak-pihak lainnya	xxx	100%
1.7	Penyertaan	xxx	100%
1.8	Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku)	xxx	100%
1.9	Aktiva antar kantor	xxx	100%
1.10	Rupa-rupa aktiva		
	a. Tagihan dalam rangka inkaso	xxx	100%
	b. Lainnya	xxx	100%
1.11	Jumlah ATMR aktiva neraca	xxx	xxx
2	Rekening Administratif		
2.1	Fasilitas kredit yang belum digunakan		
	a. Yang disediakan bagi dijamin oleh		
	- Bank sentral	xxx	0%
	- Pemerintah Pusat	xxx	0%
	- Bank lain, pemerintah daerah	xxx	10%
	- Pihak-pihak lainnya	xxx	50%
	b. Dalam rangka kredit pemilikan rumah	xxx	25%
2.2	Jaminan bank		
	a. Dalam rangka L/C atas permintaan		
	- Bank sentral, pemerintah pusat	xxx	0%
	- Bank lain, pemerintah daerah	xxx	20%
	- Pihak-pihak lainnya	xxx	100%
	b. Bukan kredit, bonds, atas permintaan		
	- Bank sentral, pemerintah pusat	xxx	0%
	- Bank lain, pemerintah daerah	xxx	10%
	- Pihak-pihak lainnya	xxx	50%
	c. L/C yang masih berlaku, atas permintaan:		
	- Bank sentral, pemerintah pusat	xxx	0%
	- Bank lain, pemerintah daerah	xxx	4%
	- Pihak-pihak lainnya	xxx	20%
2.3	Kewajiban membeli kembali aktiva bank	xxx	100%
2.4	Posisi neto kontrak berjangka valas	xxx	4%
2.5	Jumlah ATMR rekening administrative	xxx	xxx
3	Jumlah ATMR	xxx	xxx

Sumber : Ketentuan BI, dikutip dari Dendawijawa (2003)

Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif diklasifikasikan (1.25 X ATMR). Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada BI.

2.1.6.3.2 Kualitas Asset

Penilaian didasarkan pada kualitas aktiva yang dimiliki bank. Rasio yang diukur ada dua macam, yaitu :

- **Kwalitas Aktiva Produktif (KAP)**

Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. Dapat diketahui dengan rumus :

$$\text{Rasio} = \frac{\text{AP Yang Diklas.}}{\text{Total Akt. Prod.}} \times 100\%$$

- **Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)**

Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk. Rasio ini dapat diketahui dengan rumus :

$$\text{Rasio} = \frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$$

Untuk perhitungan penyisihan aktiva produktif yang wajib dibentuk dapat diketahui dengan ketentuan dibawah ini :

Tabel 2.7**KAP YANG DIKLASIFIKASIKAN**

NO	AKTIVA DIKLASIFIKASI	CADANGAN WAJIB DIBENTUK
1	Lancar	0% X besarnya rek. dalam kategori
2	Perhatian khusus	5% X besarnya rek. dalam kategori
3	Kurang lancar	15% X besarnya rek. dalam kategori
4	Diragukan	50% X besarnya rek. dalam kategori
5	Macet	100% X besarnya rek dalam kategori

Sumber: UU Perbankan No. 10. 1996

2.1.6.3.3 Aspek Kualitas Manajemen (manajemen)

Penilaian didasarkan kepada manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen rentabilitas, manajemen likuiditas dan manajemen umum. Manajemen bank dinilai atas dasar 250 pertanyaan yang diajukan.

2.1.6.3.4 Rentabilitas (earnings)

Penilaian didasarkan kepada rentabilitas suatu bank yang dilihat dari kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba.

Penilaian dalam unsur ini didasarkan pada 2 macam, yaitu :

- Rasio laba terhadap total asset (ROA), yaitu dengan melihat tingkat pengembalian laba terhadap asset.

Dapat diketahui dengan rumus :

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Laba sblm. Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

- Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), yaitu dengan melihat tingkat perbandingan biaya operasional dengan pendapatan operasional. Dapat diketahui dengan rumus :

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pdpt. Operasional}} \times 100\%$$

2.1.6.3.5 Aspek Likuiditas

Yaitu untuk menilai likuiditas bank. Penilaian likuiditas didasarkan pada dua macam rasio, yaitu :

- Rasio jumlah kewajiban bersih call money terhadap aktivitas lancar. Yang termasuk aktiva lancar adalah kas, giro dan BI, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang sudah diendos oleh bank lain. Dapat diketahui dengan rumus :

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

- Rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank.

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Kredit Yg Diberikan}}{\text{Dana Yg Diterima}} \times 100\%$$

2.1.7. Pengertian Akuisisi

Menurut PSAK No. 22, akuisisi adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi, dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban, mengeluarkan saham.

Pada dasarnya, pada semua penggabungan usaha, salah satu perusahaan yang bergabung memperoleh kendali atas perusahaan lain. Pengendalian (control) diasumsikan diperoleh apabila salah satu perusahaan yang bergabung memperoleh lebih dari 50% hak suara pada perusahaan lain, kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya bahwa tidak terdapat pengendalian walaupun kepemilikan lebih dari 50%. Meskipun salah satu dari perusahaan yang bergabung tidak memiliki lebih dari 50% hak suara pada perusahaan lain, perusahaan pengakuisisi mungkin tetap dapat diidentifikasi apabila salah satu perusahaan yang bergabung memperoleh :

- Kekuasaan lebih dari 50% hak suara atas perusahaan yang lain tersebut berdasarkan perjanjian dengan investor lain.

- **Kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan lain tersebut berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian.**
- **Kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan sebagian besar anggota pengurus perusahaan yang lain tersebut.**
- **Kekuasaan untuk mendapatkan hak suara mayoritas dalam rapat direksi perusahaan yang lain tersebut.**

2.1.7.1 Akuntansi Untuk Akuisisi

Menurut PSAK No. 22, penggabungan usaha melalui akuisisi harus dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode pembelian.

Penggunaan metode pembelian untuk akuisisi suatu perusahaan dibukukan seperti halnya pembelian aktiva lainnya. Hal ini dilakukan karena dalam akuisisi terjadi transaksi pengalihan aktiva, timbulnya kewajiban atau penerbitan saham dalam rangka memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan lain. Metode pembelian menggunakan biaya perolehan sebagai dasar untuk mencatat akuisisi tersebut.

2.1.7.2 Tanggal Akuisisi

Sejak tanggal akuisisi, perusahaan pengakuisisi harus :

- **Melaporkan hasil usaha perusahaan yang diakuisisi dalam laporan laba ruginya.**

- **Melaporkan aktiva dan keajiban perusahaan yang diakuisisi** dalam neracanya serta goodwill yang timbul dari akuisisi tersebut.

Menurut PSAK No. 22, yang dimaksud dengan tanggal akuisisi adalah tanggal pada saat kendali atas operasi dan aktiva **suatu perusahaan yang diakuisisi secara efektif dialihkan kepada** perusahaan pengakuisisi dan tanggal pada saat penerapan metode pembelian dimulai.

Hasil usaha dari perusahaan yang diakuisisi dimasukkan dalam laporan keuangan perusahaan pengakuisisi dimulai sejak tanggal akuisisi. Pada hakekatnya tanggal akuisisi adalah tanggal sejak perusahaan pengakuisisi mempunyai wewenang untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi suatu perusahaan untuk mendapatkan mamfaat dari kegiatannya.

2.1.7.3 **Biaya Perolehan (Cost of Acquisition)**

Menurut PSAK No. 22, suatu akuisisi harus dibukukan sebesar **biaya perolehan, yaitu jumlah kas atau aktiva setara kas** yang dibayar atau nilai wajar (pada tanggal pertukaran) aktiva lain yang diberikan oleh perusahaan pengakuisisi, sebagai **imbalan atas diperolehnya kendali atas aktiva neto perusahaan** lain, ditambah biaya-biaya lain yang secara langsung dapat diatribusikan pada akuisisi tersebut.

Jika dalam akuisisi terdapat lebih dari satu transaksi pertukaran, maka biaya perolehannya adalah penjumlahan dari seluruh transaksi. Apabila akuisisi dilakukan secara bertahap, maka perbedaan antara tanggal akuisisi dan tanggal transaksi pertukaran sangat penting. Karena akuntansi akuisisi dimulai sejak tanggal akuisisi, maka digunakan informasi biaya perolehan dan nilai wajar yang ditentukan pada setiap tanggal transaksi pertukaran.

2.1.7.4 Pengakuan Aktiva dan Kewajiban yang Dapat Diidentifikasi.

Aktiva dan kewajiban yang diperoleh harus dibukukan secara terpisah pada tanggal akuisisi jika :

- Besar kemungkinan bahwa segala manfaat terkait pada masa yang akan datang akan mengalir ke atau perusahaan pengakuisisi.
- Tersedia suatu ukuran yang andal sehubungan dengan biaya perolehan atau nilai wajarnya.

Aktiva dan kewajiban yang diakuisisi yang memenuhi kriteria pengakuan diatas tersebut dinyatakan dalam pernyataan ini sebagai aktiva dan kewajiban yang teridentifikasi. Apabila aktiva dan kewajiban yang diperoleh tidak memenuhi kriteria pengakuan diatas, maka hal tersebut dapat mempengaruhi penentuan nilai goodwill, sebab goodwill merupakan selisih

antara biaya perolehan dengan jumlah aktiva dan kewajiban teridentifikasi tersebut.

Aktiva dan kewajiban teridentifikasi yang diperoleh oleh perusahaan pengakuisisi dapat meliputi aktiva dan kewajiban yang tidak pernah dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan yang diakuisisi. Hal ini mungkin disebabkan karena aktiva dan kewajiban tersebut memang belum memenuhi syarat untuk dibukukan sebelum tanggal akuisisi.

2.1.7.5 Alokasi Biaya Perolehan (Allocation of Cost of Acquisition)

Aktiva dan kewajiban yang diakui harus diukur dengan menjumlahkan :

- Nilai wajar aktiva dan kewajiban teridentifikasi yang diperoleh pada tanggal transaksi pertukaran sepanjang kepemilikan perusahaan pengakuisisi diperoleh melalui transaksi pertukaran.
- Hak minoritas atas nilai tercatat aktiva dan kewajiban anak perusahaan sebelum tanggal akuisisi.

Biaya perolehan dialokasikan pada aktiva dan kewajiban berdasarkan nilai wajar aktiva dan kewajiban pada tanggal perukaran. Namun, biaya perolehan tersebut hanya berkaitan dengan presentase aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi yang diperoleh oleh perusahaan pengakuisisi. Oleh karena itu,

jika perusahaan pengakuisisi tidak membeli seluruh saham perusahaan yang diakuisisi, maka kepemilikan minoritas yang ada ditetapkan berdasarkan proporsi minoritas atas nilai tercatat aktiva dan kewajiban anak perusahaan sebelum tanggal akuisisi. Hal ini karena hak minoritas tidak menjadi bagian dari transaksi pertukaran dalam akuisisi tersebut.

2.1 Penelitian Sebelumnya

Penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dimaksudkan untuk menilai dan mengevaluasi tujuan perusahaan, sedangkan pengukuran kinerja merupakan tingkat efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai hasil yang optimal.

Peneliti Abdul Ghofar (2002) melakukan penelitian tentang Analisis Ratio Keuangan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa akuisisi berdampak positif bagi kinerja keuangan perusahaan, dilihat dari hasil perhitungan ratio keuangan yang meningkat setelah akuisisi.

Sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai Analisa Fungsi Kinerja Keuangan pada PT. BPR Karya Perdana Sejahtera Sebelum dan Sesudah Akuisisi dengan menggunakan ratio keuangan bank menurut ketentuan Bank Indonesia (BI). Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian oleh Abdul Ghofar adalah peneliti menggunakan ratio-ratio keuangan menurut standart Bank Indonesia

(BI) untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah akuisisi yang disajikan dalam tabel perbandingan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghofar menggunakan ratio-ratio keuangan dan menggunakan uji hipotesis untuk mengukur kinerja keuangan sebelum dan sesudah akuisisi.

